

**KONTRIBUSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DIBANDINGKAN DENGAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA SURAKARTA**



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Program studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi UNS
Sebagai Persyaratan mencapai derajat Ahli Madya

Oleh :

RETNANDA KRESHNA WARDANI
F3407114

**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

ABSTRACT

KONTRIBUSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DIBANDINGKAN DENGAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA

RETNANDA KRESHNA WARDANI
F3407114

The retribution is one of elements forming original local income of Surakarta that can be further developed, for example Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) and Retribusi Rumah Potong Hewan (RRPH). RPKD and RRPH are included in one group of local retribution, that is Retribusi Jasa Usaha. But every year, there are a large difference between RPKD income and RRPH income in Surakarta. This research for this final task is aimed at understanding how large the difference of RPKD income and RRPH income in Surakarta. Also the factors caused it, the efforts and troubles being faced in optimizing RPKD income to increase in budget setting every year.

The step of this research is done by comparing between theory, deriving from the reference book that is relevant and law on RPKD and RRPH, and also the actual field practice.

The writer did a quantitative analysis to comparing the degree of contribution from RPKD and RRPH to the original local income of Surakarta. It can be shown that the contribution of RPKD in 2007 is 4.45%, in 2008 4.99%, in 2009 is 5.47% and the contribution of RRPH in 2007 is 0.47%, in 2008 0.36%, in 2009 is 0.37%. by doing the qualitative analysis, we can know the factors that make the significant difference between RPKD income and RRPH income, that is the object of RPKD is more than the object of RRPH and RPKD is more potential than RRPH.

Therefore, the writer can conclude that RPKD has a large potential in its contribution to the original local income, so Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) in Surakarta conducts various efforts and has several policies to increase RPKD income.

Generally this finding shows that the policies settled by DPPKA in Surakarta is already good, but there are several things that should be rearranged to overcome the troubles property. One of phenomena most often faced is the delay of payment done by the retribution payer. They paid the retribution later than the deadline, so DPPKA must issued Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) to every retribution payer who cancelled the payment continuesly.

Keywords:

- Contribution
- RPKD and RRPH

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan judul:

**KONTRIBUSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DIBANDINGKAN DENGAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA**

Surakarta, 06 Juli 2010

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing



TRISNINIK RATIH W., SE, Ak.

NRP. 340700003

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul :

**KONTRIBUSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DIBANDINGKAN DENGAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA**

Telah disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma 3 Perpajakan

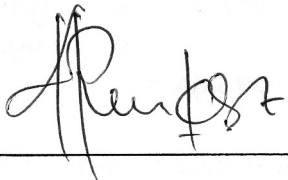
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 31 Juli 2010

Tim Penguji Tugas Akhir

ARUM K. ADIATI, SE, MM, Ak.

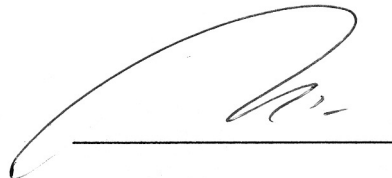
NRP. 340700002



Penguji

TRISNINIK RATIH W., SE, Ak.

NRP. 340700003



Pembimbing

MOTTO

Alon-alon waton kelakon.

=Peribahasa Jawa=

Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.

=Mark Twain=

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.

=James Thurber=

Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah.

=Nabi Muhammad Saw=

Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugrah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik..

=D'Masive=

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

=Abu Bakar Sibli=

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

=Thomas Alva Edison=

PERSEMBAHAN

ALLAH SWT
NANA & PAPA KU
SAUDARA-SAUDARAKU
ALMAHATERKU
SAHABATZ GENK DANGDHUTZ
SAHABATZ BOYZBAND
C.A KOST

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir dengan Judul “KONTRIBUSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DIBANDINGKAN DENGAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Ahli Madya pada Program Diploma 3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan laporan tugas akhir ini :

1. Allah SWT yang selalu menjadi pedoman, meridhoi dan memberi kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini serta membimbing penulis dengan segala kekuasaan dan kasih sayang-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M. Com, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, Msi, Ak. selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Sri Suranta, SE, Msi, Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

5. Pak Ahmad Ridwan, SE, Ak. selaku dosen pembimbing magang yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir
6. Ibu Trisninik Ratih W., SE, Ak. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Almarhum Ayahanda terkasih yang akan selalu menjadi panutanku dalam menjalani hidup dan Ibunda tercinta yang selalu mengayomi, menyemangati dan membantuku dalam kesusahan dan kebahagiaanku dalam menjalani hidup. Aku akan selalu menyayangi dan berbakti kepada ayah dan ibu, jasa-jasamu takkan pernah cukup untuk kubalas seumur hidupku. Love you all..
9. Someone yang selalu ada setiap waktu saat aku membutuhkanmu, yang selalu menemaniku kala sedih maupun bahagia, dan yang selalu berjuang bersamaku dari nol untuk mencapai kebahagiaan masa depan yang cemerlang. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita berdua, amin.
10. Risna, Devi, Fatim, Hanung, Rully, Dina, Muti, pakhmed, Ekomon, Bangkit, Funky, Tegar, Rosa, dan teman perpajakan lain yang selalu menceriakan hari-hariku serta memberiku inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Pak Ir. Budi Yulistyanto, selaku Kepala DPPKA Kota Surakarta, yang telah memberi izin untuk melakukan magang kerja dan penelitian di perusahaan yang beliau pimpin.

12. Nuning Sri Sulistyaningsih, SH. selaku Kepala Bagian Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Surakarta beserta staffnya yang telah memberikan bimbingan serta ilmunya kepada penulis.
13. Mas Dar, mas Ari dan mas Mul yang telah memberi bimbingan selama melakukan magang kerja dan penelitian.
14. Kost “Cahaya Asri” yang telah menjadikan kita semua saudara.
15. Semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu karena peranan penting mereka yang telah membantu dan memotivasi sejak awal semester hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Retribusi Daerah.....	8
B. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....	14
C. Retribusi Rumah Potong Hewan.....	21

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian.....	22
B. Laporan Magang kerja.....	37
C. Pembahasan Masalah.....	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1. Laporan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2009 Pemerintah Kota Surakarta.....	39
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.....	29
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Pembuatan Tugas Akhir
2. Surat Pengajuan Magang
3. Surat Konfirmasi Magang dari DPPKA Kota Surakarta
4. Surat Penyelesaian Magang
5. Lembar Penilaian Magang
6. Memo Pengumpulan Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM)
7. Laporan Penerimaan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2007 – 2009
8. Perda Kotamadya Daerah Tingkat II nomor 12 tahun 1998 Surakarta tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9. Perda Kota Surakarta nomor 5 tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Perda Kotamadya Daerah Tingkat II nomor 12 tahun 1998 Surakarta tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
10. Keputusan Walikota Surakarta nomor 8 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kota Surakarta nomor 5 tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Perda Kotamadya Daerah Tingkat II nomor 12 tahun 1998 Surakarta tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
11. Perda Kota Surakarta nomor 3 tahun 2003 tentang perubahan atas Perda Kotamadya Daerah Tingkat II nomor 11 tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat pada negara kesatuan maupun Negara federasi. Adapun tujuan otonomi daerah adalah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan.

Daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Kapasitas keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat dapat diminimalkan.

Pemerintah daerah otonom dalam melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Retribusi Daerah merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kelangsungan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perijinan Tertentu

Pada masing-masing kelompok Retribusi Daerah, terdiri atas berbagai macam retribusi yang jenisnya sangat banyak dan beragam. Pada kesempatan kali ini penulis akan memfokuskan pada dua jenis retribusi, yaitu Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah yang akan dibandingkan Retribusi Rumah Potong Hewan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk dalam satu kelompok Retribusi Daerah, yaitu kelompok Retribusi Jasa Usaha. Namun dari tahun ke tahun terdapat kesenjangan penerimaan yang cukup signifikan. Hal itu dapat terlihat dari Laporan Penerimaan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2007 - 2009. Oleh sebab itulah, penulis ingin menganalisis besarnya kesenjangan tersebut dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.

Berdasarkan gambaran umum obyek penelitian di atas, dan karena sedikitnya penelitian tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “KONTRIBUSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DIBANDINGKAN DENGAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dibandingkan dengan Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kesenjangan penerimaan yang cukup signifikan antara Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Retribusi Rumah Potong Hewan?
3. Hambatan/ kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka lebih meningkatkan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan?

C. TUJUAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan akan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak dan sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dibandingkan dengan Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan penerimaan yang cukup signifikan antara Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Retribusi Rumah Potong Hewan.
3. Untuk mengetahui hambatan/ kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka lebih meningkatkan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan.

D. MANFAAT

1. Bagi penulis

- a. Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi Diploma III Perpajakan di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa yang berkaitan dengan perpajakan.
- c. Sarana untuk memperdalam kreativitas dan ketrampilan berkaitan dengan ilmu perpajakan.
- d. Media penulis dalam menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja dalam suatu perusahaan.

2. Bagi obyek penelitian

Sebagai masukan dan evaluasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah serta sebagai salah satu sumber acuan referensi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan.

E. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Peneliti menggunakan metode studi kasus sebagai desain penelitian yaitu penelitian secara mendalam atas suatu kasus dan melakukan penelitian dengan mencari sumber pustaka di perpustakaan.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kota Surakarta.

3. Jenis dan Sumber data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis memerlukan data-data sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu mengumpulkan data dengan membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan teori dan penelitian terhadap instansi yang bersangkutan, seperti membaca buku-buku tentang retribusi di perpustakaan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau merupakan data yang telah diolah, seperti meminta data dari perusahaan untuk dianalisa.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi Langsung, dengan cara magang kerja ke instansi terkait sehingga bisa menilai dan melihat langsung prakteknya.

- b. Wawancara, dengan cara menanyakan langsung kepada staf-staf instansi mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan.
- c. Pengamatan, dengan cara mengamati Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan di Kota Surakarta tahun 2007-2009.

5. Teknik Pembahasan

a. Pembahasan Deskriptif

Yaitu membuat gambaran atau diskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu objek yang diteliti.

b. Optimasi Keputusan

Yaitu teknik untuk mensintesis suatu keputusan optimal dalam bidang perpajakan khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. RETRIBUSI DAERAH

1. Pengertian Retribusi Daerah

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut diajukan semata-mata untuk mendapat suatu prestasi dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu pelanggan. Retribusi Daerah sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 yang disebut dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Subjek Retribusi Daerah

- a. Jasa Umum adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan pula oleh pihak swasta.
- c. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Obyek Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut UU No. 18 Tahun 1999 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menyatakan bahwa objek Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan

aspek keadilan. Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi Jasa Usaha atau Perizinan tertentu
 - 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
 - 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
 - 4) Jasa tersebut layak untuk diberikan retribusi
 - 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
 - 6) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha merupakan retribusi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu.

- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perijinan tertentu merupakan retribusi yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin. Retribusi perijinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
 - 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
 - 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

4. Jenis-jenis Retribusi Daerah

a. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum antara lain:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kesehatan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemakaian Alat Pemakaian Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Ikan
- 11) Retribusi Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran

b. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha antara lain:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Terminal
- 3) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Vila
- 4) Retribusi Penyedotan Kakus
- 5) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- 7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- 2) Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian
- 3) Retribusi Izin Trayek
- 4) Retribusi Dispensasi melalui Jalan Kota
- 5) Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
- 6) Retribusi Tanda Pendaftaran Perusahaan
- 7) Retribusi Tanda Daftar Gudang
- 8) Retribusi Ijin Usaha Industri
- 9) Retribusi Ijin Usaha Perdagangan
- 10) Retribusi Perijinan Bidang Kesehatan
- 11) Retribusi Perijinan Usaha Bidang Pariwisata dan Bidang Jasa Konstruksi

5. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lainnya. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya/ kurang membayar maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

6. Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Perhitungan retribusi daerah dilakukan dengan rumus:

$$\boxed{\text{Tingkat penggunaan jasa} \times \text{tarif retribusi}}$$

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kuantitas penggunaan jasa, missal berapa kali atau jam parkir
- b. Ditaksir dengan rumus, misalnya untuk izin bangunan berdasarkan luas/bangunan, jumlah tingkat, dan rencana pembangunan.

Tarif retribusi diukur dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan
- b. Dapat ditentukan seragam/diadakan pembedaan sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif.

B. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Pengertian RPKD

Retribusi pemakaian kekayaan daerah (RPKD) termasuk retribusi jasa usaha. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menyatakan bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pungutan daerah atas pemakaian barang-barang bergerak dan/ atau tidak bergerak termasuk ruang diatasnya yang dimiliki/ dikelola dan/ atau dibawah penguasaan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

umum. Barang bergerak dalam pengertian RPKD di atas meliputi mobil ambulance, drump truk, mesin gilas, bull dozer, excavator, dan mesin cabut bulu ayam. Sedangkan yang dimaksud barang tidak bergerak adalah tanah, lapaangan, kios, dan rumah pemerintah. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2. Subyek RPKD

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/ atau menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah. Sedangkan obyek dari retribusi ini adalah setiap pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah, seperti:

- a. pemakaian tanah;
- b. pemakaian lapangan;
- c. pemakaian Kios/ Los;
- d. Rumah Pemerintah;
- e. pemakaian Ambulance;
- f. pemakaian Peralatan Dinas Pekrjaan Umum, Dinas Kebersihan/
Pertambangan dan Dinas peternkan; dan
- g. pemakaian alat-alat berat.

3. Obyek RPKD

Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pemakaian Tanah

Pemakaian tanah daerah adalah setiap perbuatan memakai tanah daerah yang berupa lapangan, pertamanan, jalan, tepi jalan, dan tiap lingkungan tanah lainnya dengan nama apapun dan terletak di dalam wilayah kota surakarta yang dikuasai dan diatur oleh pemerintah surakarta untuk tujuan tertentu dan atau mengambil keuntungan.

Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada DPPKA dengan mengisi formulir untuk memperoleh ijin pemakaian tanah. Ijin diberikan untuk pemakaian tanah selama-lamanya satu tahun, kecuali tanah untuk pemasangan Reklame Media Luar yang dilelangkan yaitu selama satu tahun. Pemakaian tanah daerah yang khusus dikelola oleh DPPKA yaitu :

- 1) pemasangan sarana Reklame Media Luar dengan cara dilelangkan,
- 2) tempat tinggal/ tegalan dengan tarif Rp. 200,-/ m² per bulan,
- 3) usaha sosial dan komersial dengan tarif untuk usaha sosial tarif Rp. 250,-/ m² per bulan dan usaha komersial tarif Rp. 500,-/ m² per bulan,

- 4) pemasangan fasilitas atau saran telekomunikasi, listrik, PDAM dan limbah dengan tarif Rp. 1.000 ,-/ m² per tahun,
- 5) penanaman pipa atau kabel jaringan telekomunikasi, listrik, PDAM dan limbah dengan tarif Rp. 250,-/ m² per tahun,
- 6) stasiun, pompa bensin umum (SPBU) dengan tarif Rp. 2000,-/ m² per bulan.

b. Pemakaian Lapangan

Pemakaian lapangan yang dimaksud adalah untuk olah raga, upacara insidental, pertunjukan tradisional, pertunjukan luar biasa dan keperluan lain yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Besarnya tarif retribusi pemakaian lapangan adalah:

- 1) untuk olah raga dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,- per lapangan/ bulan
- 2) upacara, pertunjukan tradisional sebesar Rp. 100.000,- per lapangan
- 3) jualan dan keperluan lain khusus ada event sebesar Rp. 300,-/ m² per hari

c. Pemakaian Kios/ Los

Kios adalah bangunan untuk tempat berjualan dan/ atau menjalankan usaha dengan luas tidak lebih dari 4 meter. Setiap pembuatan kios harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) rangka kios terbuat dari kayu,

- 2) dinding terbuat dari lembaran halus, seperti kayu dipasah, hardbord, triplek, seng, atau sejenisnya,
- 3) Atap terbuat dari seng/ asbes yang bergelombang,
- 4) Lantai terbuat dari papan, tegel atau semen,
- 5) Ukuran satu sisi sedikitnya 1,5 meter.

Kios dibagi menjadi 4 (empat) golongan dan besarnya tarif yang dikenakan, yaitu:

- 1) Kios golongan I sebesar Rp. 10.000,-/ m² per bulan,
- 2) Kios golongan II sebesar Rp. 14.000,-/ m² per bulan,
- 3) Kios golongan III sebesar Rp. 3.000,-/ m² per bulan,
- 4) Kios golongan IV sebesar Rp. 1.000,-/ m² per bulan.

d. Rumah Pemerintah

Dalam penggunaannya rumah pemerintah dibagi menjadi 3, yaitu untuk tempat tinggal, usaha sosial, dan usaha komersial.

Besarnya tarif RPKD untuk rumah pemerintah, yaitu:

- 1) untuk tempat tinggal

kelas A1 sebesar Rp. 21.000,-/ bulan

kelas A2 sebesar Rp. 16.000,-/ bulan

- 2) untuk usaha sosial

kelas S1 sebesar Rp. 34.000,-/ bulan

kelas S2 sebesar Rp. 32.000,-/ bulan

kelas S3 sebesar Rp. 27.000,-/ bulan

3) untuk usaha komersial

kelas K1 sebesar Rp. 75.000,-/ bulan

kelas K2 sebesar Rp. 50.000,-/ bulan

kelas K3 sebesar Rp. 40.000,-/ bulan

e. Pemakaian Ambulance

Untuk mendapatkan izin pemakaian ambulance, pemohon harus mengisi formulir yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Pembayaran pemakaian mobil ambulance dilakukan secara tunai kepada Dinas Kesehatan dengan tarif sebesar Rp. 20.000,- sekali pakai ditambah Rp. 2.000,-/ km dan Rp. 65.000,-/ hari dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 50% disetor ke kas daerah,
- 2) 50% dipakai langsung untuk biaya bahan bakar dan operasional pelayanan.

f. Pemakaian Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan/ Pertamanan, dan Dinas Peternakan.

Wajib Retribusi daerah yang ingin memakai peralatan dinas diwajibkan untuk:

- 1) menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya,
- 2) pengambilan peralatan tidak dalam keadaan rusak, dan
- 3) pemegang izin tidak boleh menyewakan kepada orang lain (pihak ketiga).

Besarnya tarif retribusi pemakaian peralatan dinas, yaitu:

- 1) drump truck sebesar Rp. 65.000,-/ hari
- 2) mesin gilas sebesar Rp. 55.000,-/ hari
- 3) bull dozer sebesar Rp. 50.000,-/ jam
- 4) excavator sebesar Rp. 90.000,-/ jam
- 5) mesin cabut bulu ayam sebesar Rp. 5.000,-/ hari

g. Balik nama Rumah Pemerintah, dan Kios/ Los.

Pemindahan hak atas pemakaian Rumah pemerintah dan kios/ los diikuti dengan balik nama bagi Wajib Retribusi. Besarnya retribusi balik nama adalah 10% dari harga taksiran rumah/ kios yang dibalik namakan.

Sejak tahun 2001-2004 dalam pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Dipenda (yang sekarang berganti nama menjadi DPPKA) menangani 3 obyek RPKD yaitu pemakaian tanah, pemakaian lapangan, dan pemakaian kios/ los. Tapi pada tahun 2005 pemakaian lapangan tidak lagi ditangani oleh Dipenda dan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Jadi mulai tahun 2006, Dipenda hanya menangani 2 obyek RPKD yaitu, pemakaian tanah dan pemakaian kios.

Dalam pemungutannya RPKD menggunakan *Official Assesment System* yang merupakan sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang.

C. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

1. Pengertian RRPH

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, menyatakan bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pemungutan atas pelayanan pemeriksaan kesehatan, penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak sebelum, saat pelaksanaan dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Pertanian.

2. Subyek RRPH

Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan (RRPH) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

3. Obyek RRPH

Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan pemotongan hewan
- b. pemeriksaan hewan sebelum, saat dan sesudah dipotong
- c. pemeriksaan daging dan kulit hewan setelah dipotong
- d. pemeriksaan daging dari luar Kota Surakarta.

BAB III

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

1. Sejarah dan Perkembangan DPPKA Kota Surakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 162/ Kep/ Kdh. IV/ Kp. 72 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat DIPENDA. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas Pendapatan Daerah dibagi menjadi 4 seksi, yaitu Seksi Umum, Seksi Pajak Daerah, Seksi Pajak Pusat atau Propinsi yang diserahkan kepada Daerah dan Seksi Doleansi/ P3 serta Retribusi dan Leges. Masing-masing sekssi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai pelaksana Walikota di bidang perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan di bidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam Pajak Daerah di Kota Surakarta

yang wewenang pemungutandan pengelolaannya ada pada DIPENDA. Tetapi saat itu baru 4 macam Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu:

- a. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1992.
- b. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1971.
- c. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 1953.
- d. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1971.

Disamping itu DIPENDA juga bertugas mengelola Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1959.
- b. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1960.
- c. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1970.
- d. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1957.

Terbitnya Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor KUPD 7/12/41-101 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II makin memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan Keputusan Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 Nomor 473-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan prosedur tersebut dikenal dengan MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem ini diterapkan di Kotamadya Surakarta dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan berjalannya waktu penataan pemerintahan Kota Surakarta kembali mengalami perbaikan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dalam peraturan baru ini Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau yang sering disebut DPPKA. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Saat ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibagi ke dalam bidang-bidang yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas. Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian atau biasa disebut Kabag yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi DPPKA

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta. DPPKA Kota Surakarta mempunyai tugas pokok seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 34 ayat (2) yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.

Sedangkan fungsi DPPKA antara lain:

- a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi;

- e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain;
- f. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan lain;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
- h. Pengelolaan asset barang daerah;
- i. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;
- k. Penyelenggaraan sosialisasi;
- l. Pembinaan jabatan fungsional;
- m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

3. Susunan Organisasi

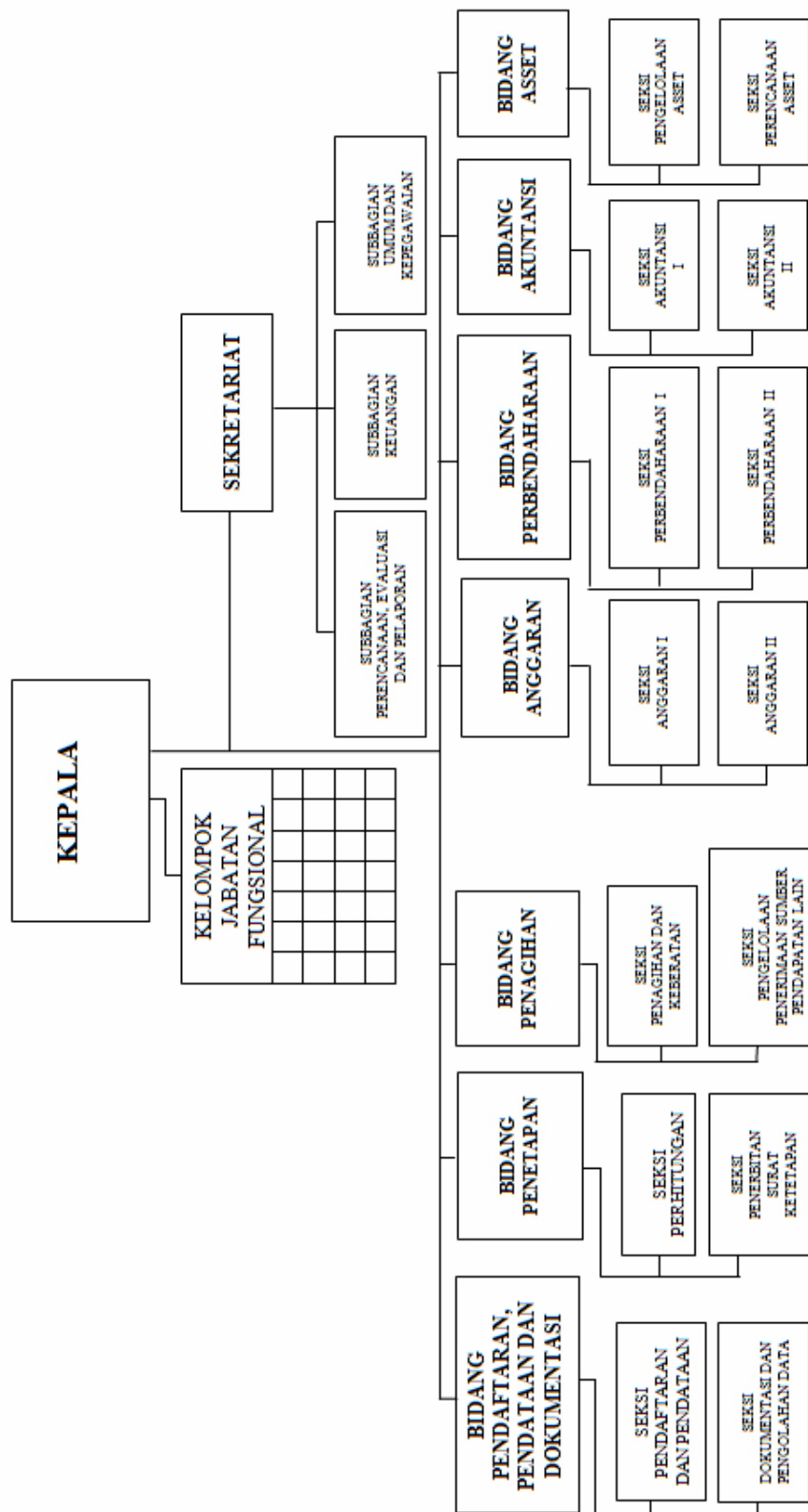
Adapun Susunan Organisasi DPPKA Kota Surakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- d. Bidang Penetapan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perhitungan;
 - 2. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
- e. Bidang Penagihan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain
- f. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Anggaran I;
 - 2. Seksi Anggaran II.
- g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembendaharaan I;
 - 2. Seksi Perbendaharaan II.
- h. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 - 1. Seksi Akuntansi I;
 - 2. Seksi Akuntansi II.
- i. Bidang Asset, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Asset;
 - 2. Seksi Pengelolaan Asset.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam struktur organisasi yang baru ini Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Untuk bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang atau Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi DPPKA menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat dalam gambar III.1 berikut:



Gambar III.1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Sumber: DPPKA Kota Surakarta

4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah

Uraian tugas seorang Kepala dinas:

- 1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan Program Pembangunan daerah
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas
- 3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat

Sekretariat yang posisinya dibawah langsung oleh Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan adminsitarsi umum, perijinan, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sekretariat juga bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi subbagian-subbagian sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Subbagian ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan Program kerja Tahunan Dinas. Selain itu juga bertugas sebagai pelaksana/melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi dan serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas.

2) Sub Bagian Keuangan

Subbagian keuangan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas yang cukup banyak yaitu melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat, sistem jaringan dokumentasi, informasi hukum, dan administrasi kepegawaian.

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi mempunyai tugas yang penting yaitu menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh dinas.

Bidang ini membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD)

2) Seksi Dokumentasi dan Pengolah Data

Tugas dari seksi dokumentasi dan pengolah data adalah menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.

d. Bidang Penetapan

Bidang ini bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang penghitungan, penerbitan Surat Penetapan Pajak dan Retribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. bidang Penetapan membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1) Seksi Perhitungan

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi.

2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Tugas dari seksi ini adalah menetapkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Retribusi, dan surat- surat ketetapan pajak lainnya.

e. Bidang Penagihan

Bidang ini memiliki tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang penagihan dan keberatan serta pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan kebijakan teknis oleh Kepala Dinas. Seksi-seksi yang dibawahhi oleh Bidang Penagihan, yaitu:

1) Seksi Penagihan dan Keberatan

Tugas yang dipikul adalah melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya.

2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

Tugas seksi ini adalah mengumpulkan data sumber-sumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran ini bertugas untuk membuat rencana anggaran penerimaan pajak, retribusi, dan rencana pembelanjaan keperluan instansi serta mengatur pengeluaran- pengeluaran dana yang telah dianggarkan atau direncanakan.

Bidang Anggaran ini terdiri atas 2 seksi yang merupakan satu kesatuan yaitu sebagai berikut:

1) Seksi Anggaran I

2) Seksi Anggaran II

g. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbedaharaan memegang peranan sebagai pemegang dana dalam instansi yang juga dibantu oleh dua kelompok seksi

1) Seksi Perbendaharaan I

2) Seksi Perbendaharaan II

h. Bidang Akuntansi

Bidang ini memiliki tugas sebagai pencatat segala bentuk kegiatan pendanaan yang kemudian dibuat laporan sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas.

Bidang Akuntansi membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1) Seksi Akuntansi I

2) Seksi Akuntansi II

i. Bidang Aset

Bidang Asset bertugas untuk mencatat dan mengelola semua asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

Bidang Aset membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1) Seksi Perencanaan Aset

Seksi ini mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan semua asset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Surakarta sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah.

2) Seksi Pengelolaan Aset

Seksi bertugas sebagai pelaksana rencana yang telah dibuat oleh Seksi Perencanaan Aset dan juga sebagai pengelola asset-aset tersebut.

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD bertugas untuk memungut dan mengelola pajak dan retribusi daerah Kota Surakarta.

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok ini memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pada cabang Dinas di Kecamatan.

5. Tata Kerja DPPKA

Dalam melaksanakan tugasnya, DPPKA Kota Surakarta mendapatkan pembinaan teknis fungsional dari DPPKA Tingkat I Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala dinas menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan DPPKA sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Kepala Sekretariat, Kepala seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada

bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkis jabatan masing-masing. Kepala Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Para Kepala seksi pada DPPKA bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sekretariat atau Kepala Bagian yang membidangnya.

Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi di lingkungan DPPKA Kotamadya Dati II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. Kepala Urusan, Kepala seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan di lingkungan DPPKA Kotamadya Dati II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Kepala Daerah Dati II Surakarta.

6. Visi dan Misi DPPKA

a. Visi DPPKA

Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang optimal dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah untuk mendukung pembanguna daerah.

b. Misi DPPKA antara lain:

- 1) Pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan

- 3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional
- 4) Menciptakan sistem pengawas yang efektif.

B. LAPORAN MAGANG KERJA

Penulis melakukan kegiatan magang di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mulai tanggal 01 Februari – 31 Maret 2010. Setiap harinya kegiatan diawali pada pukul 07.15. Pada hari Senin – Kamis kegiatan diakhiri pukul 15.15, sedangkan pada hari Jum'at hanya sampai pukul 11.00.

Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah bidang yang bertugas untuk mencatat dan mengelola semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Bidang inilah yang ditempati oleh penulis selama melakukan kegiatan magang.

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis saat melakukan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

1. Mengetik, memfotokopi, dan meminta cap untuk berbagai macam surat.
2. Mengecek masa retribusi/ masa sewa wajib retribusi dengan program Mapatda
3. Mengklasifikasikan barang daerah yang akan dihapus ke dalam beberapa golongan, yaitu elektronik, mebeulair, Dispora, DKP, dan DISHUB
4. Membuat rekapitulasi barang daerah yang akan dihapus
5. Mengentry data NJOP berdasarkan golongannya
6. Mengetik RKA tahun 2010
7. Membuat rekapitulasi tanah pemerintah yang belum bersertifikat

8. Mencocokkan daftar monitoring dengan penggunaan tanah Pemkot saat ini
9. Mengecek buku pembantu penerimaan sejenis via BKP dengan program Mapatda
10. Mencari sertifikat tanah yang digunakan PDAM dan memfotokopinya
11. Mengedarkan berbagai macam Surat Undangan
12. Mendisposisikan Surat Masuk
13. Menunggu Rapat di Sekretariat Daerah
14. Meminta Tanda tangan Sekretaris Daerah
15. Meminta nomor surat undangan ke bagian Umum
16. Mengembalikan SKRD per nama
17. Mencatat personil pengurus barang yang dikirimkan oleh tiap SKPD
18. Mengisi data RPKD
19. Mencatat ayat lama dan ayat baru wajib retribusi
20. Mencari data laporan realisasi penerimaan Kota Surakarta dan struktur organisasi DPPKA Kota Surakarta sebagai bahan TA.

C. PEMBAHASAN MASALAH

1. Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dibandingkan dengan Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

Perbandingan Kontribusi Retribusi Kekayaan Daerah dengan Retribusi Rumah Potong Hewan dapat dilihat pada Tabel III.1.

Tabel III.1
Laporan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2007 - 2009

	2007	2008	2009
Pendapatan Asli Daerah	89,430,977,982	102,929,501,970	101,972,318,682
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,980,269,898	5,145,802,156	5,582,627,346
Retribusi Rumah Potong Hewan	422,177,050	374,888,950	374,846,250

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Besar kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan dapat diketahui dengan rumus (Digdo, 2005):

$$k = \frac{\sum RPR}{\sum PAD} \times 100\%$$

Keterangan:

k = Kontribusi Retribusi terhadap PAD

$\sum RPR$ = Jumlah realisasi retribusi

$\sum PAD$ = Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi RPKD terhadap PAD Kota Surakarta

$$\text{Tahun 2007} = \frac{3,980,269,898}{89,430,977,982} \times 100\% = 4.45 \%$$

$$\text{Tahun 2008} = \frac{5,145,802,156}{102,929,501,970} \times 100\% = 4.99 \%$$

$$\text{Tahun 2009} = \frac{5,582,627,346}{101,972,318,682} \times 100\% = 5.47 \%$$

Kontribusi RRPH terhadap PAD Kota Surakarta

$$\text{Tahun 2007} = \frac{422,177,050}{89,430,977,982} \times 100\% = 0.47 \%$$

$$\text{Tahun 2008} = \frac{374,888,950}{102,929,501,970} \times 100\% = 0.36 \%$$

$$\text{Tahun 2009} = \frac{374,846,250}{101,972,318,682} \times 100\% = 0.37 \%$$

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun besar kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta selalu lebih besar dibandingkan dengan Retribusi Rumah Potong Hewan (RRPH). Misalnya saja pada tahun 2007, kontribusi RPKD terhadap PAD Kota Surakarta adalah 4.45% sedangkan kontribusi RRPH hanya sebesar 0.47% saja. Hal itu juga terjadi pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2008 kontribusi RPKD terhadap PAD Kota Surakarta adalah 4.99% sedangkan kontribusi RRPH hanya sebesar 0.36% dan pada tahun 2009 kontribusi RPKD

terhadap PAD Kota Surakarta adalah 5.47% sedangkan kontribusi RRPH hanya sebesar 0.37%.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi RPKD lebih besar dibandingkan dengan RRPH dalam menunjang PAD Kota Surakarta. Oleh karena itu, DPPKA Kota Surakarta ingin lebih meningkatkan lagi penerimaan RPKD. Selain itu, Dinas Pertanian Kota Surakarta juga ingin lebih meningkatkan penerimaan RRPH karena dirasa penerimaannya belum maksimal. Namun, untuk mewujudkan keinginannya tersebut DPPKA Kota Surakarta dan Dinas Pertanian menemui beberapa hambatan/ kendala.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan penerimaan yang cukup signifikan antara Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Retribusi Rumah Potong Hewan

Setelah dilakukan perhitungan besar kontribusi RPKD dibandingkan dengan RRPH terhadap PAD Kota Surakarta, maka semakin terlihat bahwa memang ada kesenjangan yang cukup signifikan diantara kedua macam retribusi tersebut, padahal keduanya termasuk ke dalam golongan retribusi yang sama yaitu Retribusi Jasa Usaha. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kesenjangan tersebut antara lain:

- a. Jumlah obyek RPKD yang lebih banyak daripada obyek RRPH

- b. RPKD lebih potensial dibanding RRPH, karena pada RPKD masih banyak potensi-potensi yang masih bisa digali lagi, sedangkan pada RRPH sangat sedikit.

3. Hambatan/ kendala yang dihadapi dalam rangka lebih meningkatkan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan

Dalam rangka mewujudkan keinginan untuk lebih meningkatkan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, DPPKA Kota Surakarta menghadapi beberapa hambatan/ kendala. Hambatan/ kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka operasional pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- c. Masih ada beberapa obyek dan subyek retribusi yang belum terdeteksi oleh DPPKA Kota Surakarta.
- d. Masih rendahnya kesadaran Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi, misalnya Wajib Retribusi terlambat melakukan pembayaran sampai melewati tanggal jatuh tempo, atau bahkan tidak melakukan pembayaran jika tidak ada yang melakukan penagihan.

Dinas Pertanian Kota Surakarta juga menghadapi beberapa hambatan/ kendala dalam rangka mewujudkan keinginan untuk lebih meningkatkan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan, antara lain:

- a. Masih rendahnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini.
- b. Sulitnya menggali potensi selain yang telah ada pada Retribusi Rumah potong Hewan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dibandingkan dengan Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta pada Bab III, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kontribusi RPKD dalam menunjang PAD Kota Surakarta lebih besar dibandingkan Retribusi Rumah Potong Hewan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan penerimaan RPKD dan RRPH terhadap PAD Kota Surakarta pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2007 kontribusi RPKD terhadap PAD Kota Surakarta sebesar 4,45% sedangkan RRPH 0,47%. Pada tahun 2008 kontribusi RPKD terhadap PAD Kota Surakarta sebesar 4,99% sedangkan RRPH 0,36%. Pada tahun 2009 kontribusi RPKD terhadap PAD Kota Surakarta sebesar 5,47% sedangkan RRPH 0,37%.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan penerimaan RPKD dengan RRPH yang cukup signifikan antara lain: Pada RPKD masih banyak potensi-potensi yang masih bisa digali lagi, sedangkan pada RRPH tidak ada, dan jumlah obyek RPKD yang lebih banyak daripada obyek RRPH.

3. Dalam meningkatkan penerimaan RPKD masih ditemui adanya beberapa hambatan, yaitu masih rendahnya tarif RPKD, keterbatasan sumber daya manusia, masih ada beberapa obyek dan subyek retribusi yang belum terdeteksi oleh DPPKA Kota Surakarta, masih rendahnya kesadaran Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi. Selain itu Dinas Pertanian juga menemui beberapa hambatan dalam meningkatkan penerimaan RRPH, yaitu masih rendahnya tarif RPKD dan sulitnya menggali potensi RRPH yang lain.

B. SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengevaluasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Rumah Potong Hewan sehingga tarif yang ada bisa diperbaharui sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini.
2. Memberikan sanksi yang tegas kepada Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi, berupa sanksi administrasi (denda).
3. Memberikan diklat dan pembinaan kepada petugas pengelola RPKD untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pemungut retribusi serta memberikan sarana dan prasarana yang memadai bagi petugas pengelola RPKD sehingga akan memudahkan dan meningkatkan kinerja mereka.

4. Meningkatkan kesadaran wajib retribusi akan pentingnya membayar retribusi dengan cara memberikan penyuluhan tentang retribusi, khususnya RPKD yang dijadwal secara rutin.
5. Meningkatkan kegiatan penagihan kepada wajib retribusi yang tidak/ belum memenuhi kewajibannya.
6. Memberikan penyuluhan kepada Wajib Retribusi tentang arti penting pembayaran retribusi bagi kepentingan bersama.
7. Menggali potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selain yang telah ada, seperti pemungutan retribusi untuk pemakaian tanah eks kuburan sebagai hunian liar (yang telah diberlakukan mulai awal tahun 2010).
8. Mengevaluasi Perda tentang Retribusi Rumah Potong Hewan agar banyak yang memanfaatkan jasa di Rumah Potong Hewan, seperti melakukan promosi.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiriyah. 2006. *Analisis Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Surakarta Tahun 2001-2005*. Surakarta: Tugas Akhir.
- Dedi, Hamid, Sholeh Soady. 2002. *Retribusi Daerah, Pajak Daerah*. Jakarta: Durat Bahagia.
- Digdo, Heru Priyo. 2005. *Analisis Perkembangan Retribusi Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 1994/1995 – 2003*. Yogyakarta: Skripsi.
- Haryani, Anita. 2008. *Efektivitas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta*. Surakarta: Tugas Akhir.
- Keputusan Walikota Surakarta nomor 8 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kota Surakarta nomor 5 tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Perda Kotamadya Daerah Tingkat II nomor 12 tahun 1998 Surakarta tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Perda Kota Surakarta nomor 3 tahun 2003 tentang perubahan atas Perda Kotamadya Daerah Tingkat II nomor 11 tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
- Perda Kota Surakarta nomor 5 tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Perda Kotamadya Daerah Tingkat II nomor 12 tahun 1998 Surakarta tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Perda Kotamadya Daerah Tingkat II nomor 12 tahun 1998 Surakarta tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Siswardani, Fahmi. 2008. *Efektivitas Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri*. Surakarta: Tugas Akhir.
- Wigiadayu, Erly. 2008. *Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam Rangka Peningkatan Retribusi Pasar*. Surakarta: Tugas Akhir.